



Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah untuk Meningkatkan Otonomi Sekolah di SMP

Orrochelcy Mardly Narendas^{1✉}, Suyatno Suyatno², Hendro Widodo³
Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia^{1,2,3}

e-mail : 2307046015@webmail.uad.ac.id¹, suyatno@pgsd.uad.ac.id², hendro.widodo@pgsd.uad.ac.id³

Abstrak

MBS memberikan otonomi yang luas pada unit sekolah itu sendiri dan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pendidikan. Sekolah yang memiliki otonomi yang baik memiliki kemampuan untuk menyesuaikan kurikulum, strategi pembelajaran, dan kebijakan manajemen dengan kebutuhan lokal dan kondisi lingkungan pendidikan yang unik. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan otonomi sekolah. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan desain penelitian berupa pendekatan studi kasus, subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru mata pelajaran dan komite sekolah. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk mengecek keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi dibagi menjadi 3 aspek yaitu pembiayaan pendidikan, pengelolaan pembelajaran dan pengambilan keputusan. Pembiayaan pendidikan harus melibatkan berbagai pihak seperti guru, komite sekolah, dan orang tua siswa. Kebijakan yang dilaksanakan berupa menyusun anggaran, penggalangan dana dan pengelolaan keuangan. Pengelolaan pembelajaran dijalankan secara fleksibel, dengan adanya otonomi memberikan kebebasan dalam melakukan pengembangan terhadap kurikulum dan menilai siswa. Dalam pengambilan keputusan sekolah melakukan musyawarah guru dan melibatkan masyarakat dalam berpartisipasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah.

Kata Kunci: MBS, Otonomi Sekolah, SMP, Pengelolaan Pendidikan

Abstract

SBM gives broad autonomy to the school unit itself and allows the community to participate in improving education. Schools that have good autonomy can adapt curriculum, learning strategies, and management policies to local needs and unique educational environment conditions. The purpose of this study is to find out the implementation of school-based management to increase school autonomy. This research uses qualitative techniques with a research design in the form of a case study approach, the subjects of this research are school principals, subject teachers, and school committees. Data was collected through interviews, observations, and documentation. The researcher used the triangulation technique to check the validity of the data. The results of the study show that autonomy is divided into 3 aspects, namely education financing, learning management, and decision-making. Education financing must involve various parties such as teachers, school committees, and parents of students. The policies implemented are in the form of preparing a budget, fundraising, and financial management. Learning management is carried out flexibly, with autonomy providing freedom in developing the curriculum and assessing students. In decision-making, the school conducts teacher deliberations and involves the community in participating in related activities at school.

Keywords: School-based management, School autonomy, Junior High School, Education Management

Copyright (c) 2024 Orrochelcy Mardly Narendas, Suyatno Suyatno, Hendro Widodo

✉ Corresponding author :

Email : 2307046015@webmail.uad.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i6.7756>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

PENDAHULUAN

Salah satu jenis reformasi, yaitu desentralisasi atau otonomi pendidikan, harus diterapkan dengan baik. Dalam konteks manajemen peningkatan kualitas berbasis sekolah, istilah reformasi sekolah berarti pergeseran ke arah peningkatan mutu (Devi & Subiyantoro, 2021). Otonomi sekolah memberikan wewenang yang besar dalam mengelola sekolahnya, yang berarti sekolah akan lebih mandiri. Dengan mandirinya, sekolah diharapkan dapat mengembangkan program-programnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki (Efriani et al., 2021).

MBS memberikan otonomi yang luas pada unit sekolah itu sendiri dan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pendidikan. Kepala sekolah dan guru-guru berkolaborasi dalam musyawarah, memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan (Pratiwi, 2016). Dalam penerapannya tidak hanya diperlukan perubahan pada sistem manajemen sekolah, tetapi juga mempengaruhi kebijakan dan orientasi partisipasi masyarakat dalam pembelajaran (Devi & Subiyantoro, 2021). MBS memberi sekolah lebih banyak dengan mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya (Efriani et al., 2021). Pihak-pihak terkait partner sekolah diharapkan bekerja sama untuk mengelola dan menyelenggarakan pembelajaran.

Salah satu masalah dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah adalah mengelola dan menerapkan pendekatannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Meilani et al., (2022) peran masyarakat yang belum maksimal menjadi kendala dalam pelaksanaan administrasi berbasis sekolah. Menurut Efriani et al., (2021) faktor penghambat dalam implementasi manajemen berbasis sekolah yaitu beberapa pihak yang kurang mendukung peraturan yang diterapkan di sekolah, sebagian masyarakat ada yang tidak suka dengan sekolah tempat anak-anaknya bersekolah dan tidak mau membantu untuk kemajuan sekolah. Pemerintah pusat dan daerah telah melakukan banyak hal, seperti meningkatkan kurikulum, memberikan dana untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang memadai, dan memberikan pelatihan yang terorganisir untuk meningkatkan kemampuan guru. Namun, upaya yang dilakukan pemerintah tidak cukup memuaskan. Karena kebijakan dan upaya pemerintah tidak diterapkan secara merata di semua lembaga pendidikan (Makmur Jaya et al., 2021).

Sekolah yang memiliki otonomi yang baik memiliki kemampuan untuk menyesuaikan kurikulum, strategi pembelajaran, dan kebijakan manajemen dengan kebutuhan lokal dan kondisi lingkungan pendidikan yang unik. Namun, otonomi sekolah juga memerlukan kepala sekolah yang kuat dan cerdas (Hardi Jansa et al., 2021). Otonomi pengelolaan sekolah berarti bahwa sekolah diberi kebebasan untuk mengelola sumber dayanya dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan sekolah bersama masyarakat (Hamidi, 2016).

Dalam hal ini, masyarakat berperan dalam membantu dan mengontrol penyelenggaraan pendidikan dalam kerangka kebijakan nasional (Hamidi, 2016). Meskipun konsep otonomi sekolah memiliki banyak potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, melaksanakannya menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan kepemimpinan di kalangan kepala sekolah dan staf pengajar (Darajat et al., 2022). Banyak pendidik dan kepala sekolah kurang memahami konsep otonomi sekolah dan bagaimana menggunakannya dalam pendidikan sehari-hari (Priyadi, 2024). Sangat mudah bagi masyarakat untuk menuduh guru dan kepala sekolah sebagai penyebab utama masalah atau kegagalan sekolah (Wahyuningrum, 2011). Stakeholder sekolah menghadapi tantangan besar ketika sekolah diberi kesempatan yang sangat besar untuk mengembangkan potensi mereka sendiri dalam rangka otonomi (Hamidi, 2016).

Dari analisis data studi kasus, terdapat beberapa tantangan utama yang diidentifikasi oleh Maulana et al., (2023) yaitu kurangnya pemahaman dan keterampilan kepemimpinan dalam mengembangkan strategi kepemimpinan yang efektif, resistensi terhadap perubahan dari beberapa pihak, terbatasnya sumber daya dan dukungan eksternal yang dapat menghambat sekolah untuk mengembangkan dan melaksanakan inisiatif baru dan meningkatkan kualitas pendidikan, dan ketidakstabilan politik dan sosial yang mengakibatkan perubahan kebijakan yang tidak konsisten yang menghambat sekolah untuk membuat keputusan sendiri.

Fakta bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil dapat dijelaskan oleh dua faktor. Pertama, strategi pembangunan pendidikan saat ini lebih berfokus pada input. Strategi ini bergantung pada gagasan bahwa jika semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya. Sekolah akan secara otomatis dapat menghasilkan output yang diharapkan yang berkualitas. Kedua, banyak hal yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana harus dilakukan di tingkat mikro (sekolah) (Hamidi, 2016).

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Penulis/Tahun	Metode Penelitian	Ringkasan
Churdaini, (2020)	Kualitatif	Menyusun dan menerapkan visi, misi, strategi, tujuan dan sasaran, serta tata tertib sekolah.
Muhammad & Rahman, (2017)	Kualitatif	Mengembangkan kurikulum dan pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, pembiayaan dan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat.
Anggraeni, (2016)	Kualitatif	Penerapan strategi MBS dengan tahapan sosialisasi, perumusan visi, misi dan tujuan sekolah, melibatkan sumber daya pendidikan, melakukan analisis SWOT, penyusunan rencana dan program kerja, serta pelaksanaan program dan evaluasi.
Devi Subiyantoro, (2021)	& Kualitatif	Melakukan 3 gerakan inspiratif seperti program manajemen sekolah terbuka, program jumpa kopi, dan program SIMak atau Sinergi Interaksi Memantau Aktif Pembelajaran di Kelas.
Efriani et al., (2021)	Kualitatif	Memiliki manajemen humas yang baik dengan masyarakat setempat, peran masyarakat tinggi, serta membantu gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis memilih judul “Impelementasi Manajemen Berbasis Sekolah untuk Meningkatkan Otonomi Sekolah di SMP Negeri 6 Tanjungpandan”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan otonomi sekolah? Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan otonomi sekolah. Fokus penelitiannya yaitu proses manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan otonomi sekolah.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian berupa pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, kelompok, lembaga dan organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Penelitian kualitatif dengan studi kasus bertujuan untuk meneliti suatu permasalahan melalui studi kasus yang terdiri dari unit tunggal yaitu berarti suatu orang, sekelompok penduduk atau sekelompok masyarakat di suatu daerah dengan masalah tertentu (Crewell, 2015).

Penentuan subjek penelitian dilakukan saat peneliti mulai melakukan observasi lapangan saat penelitian berlangsung. Subjek dalam penelitian ini hanya diambil 3 orang saja yaitu kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan komite sekolah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi yang dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan MBS yang ada di SMP Negeri 6 Tanjungpandan. Wawancara sudah tersusun dengan format pertanyaan yang lengkap dan dilakukan dengan narasumber kepala sekolah, guru mata pelajaran dan komite. Dokumentasi didapatkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Sedangkan instrumen yang digunakan pedoman wawancara, pedoman observasi dan,

pedoman dokumentasi. Instrumen dipersiapkan dengan melakukan penelitian awal terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dan membuat berbagai pertanyaan yang sesuai dengan pertanyaan penelitian.

Proses analisis data yang dilakukan melalui beberapa tahapan melalui proses pengumpulan data yang dimana data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi harus menggunakan berbagai teknik dan sumber, yang kedua reduksi data dengan mengolah data yang sudah diperoleh, memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian sehingga menjadi sebuah rangkuman, ketiga penyajian data dimana data yang sudah diolah disusun menjadi bentuk yang padu dan dipahami, dan terakhir penarikan kesimpulan, harus didukung bukti yang valid saat pengumpulan data di lapangan supaya kredibel dan terpercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjalankan fungsinya, sekolah harus bersifat kreatif dan dinamis maksudnya, sekolah mampu untuk beradaptasi dan berinovasi guna meningkatkan kualitas pendidikan. Jika diterapkan dengan benar, otonomi sekolah dapat sangat menguntungkan guru, siswa, sekolah dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, profesionalisme guru dapat dilihat. Guru memiliki banyak tanggung jawab, salah satunya adalah memiliki kompetensi ideal sebagai guru profesional. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional yang bersifat akademis, pribadi, dan sosial. Dengan kata lain, guru profesional ini memiliki keahlian khusus dalam keguruan yang memungkinkannya melakukan pekerjaannya dengan baik dan terarah.

Seorang guru profesional harus memiliki kemampuan untuk merencanakan program pengajaran, melaksanakan program dengan baik dan mengevaluasi hasil pembelajaran untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai. Penerapan otonomi di sekolah juga terdapat tantangan dimana sistem pendidikan yang tersentralisasi karena kementerian pendidikan kebudayaan dan ristek memiliki wewenang cukup besar atas kurikulum. Tantangan lainnya dalam penerapan otonomi yaitu, kurangnya pemahaman dan keterampilan kepemimpinan, resistensi terhadap perubahan, terbatasnya sumber daya dan dukungan eksternal, dan ketidakstabilan politik dan sosial.

Selain itu, strategi yang dapat mengatasi tantangan dalam implementasi otonomi sekolah adalah dengan cara peningkatan pelatihan dan pengembangan kepemimpinan, pembentukan komite sekolah yang inklusif, penguatan kerjasama antar sekolah dan lembaga pendidikan lainnya, serta peningkatan keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah. Sehingga peran kepala sekolah dan guru penting dalam mengelola otonomi di sekolah seperti meningkatkan mutu pendidikan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan.

Dengan adanya otonomi sekolah yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya, sekolah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru, sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas.

Hasil

Otonomi Sekolah

Kata otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani *autos* yang berarti sendiri, dan *nomos* yang berarti hukum atau aturan. Otonomi adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional (Anggraeni, 2016).

Otonomi sekolah adalah konsep yang mendorong sekolah untuk memiliki kontrol yang lebih besar terhadap pengelolaan sumber daya, pembelajaran, dan kebijakan internal (Priyadi, 2024). Dengan otonomi sekolah yang baik, sekolah memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan kurikulum, strategi pembelajaran, dan kebijakan manajerial sesuai dengan kebutuhan lokal dan kondisi spesifik lingkungan pendidikan. Namun, implementasi otonomi sekolah juga memerlukan kepemimpinan yang kuat dan visioner dari kepala sekolah (Ismanto et al., 2022).

1. Pembiayaan Pendidikan

Setelah dilakukannya penelitian ditemukan bahwa SMP Negeri 6 Tanjungpandan dalam menerapkan otonomi pembiayaan pendidikan harus melibatkan berbagai pihak. Mengelola keuangan memberikan dampak yang signifikan karena otonomi memberikan kebijakan yang lebih luas dan fleksibel sesuai kebutuhan sekolah.

a. Menyusun Anggaran

Dalam menyusun anggaran yang dilakukan oleh SMP Negeri 6 Tanjungpandan harus melibatkan berbagai pihak agar dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab. Pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran tersebut adalah orang tua siswa, guru dan komite sekolah. Anggaran yang disusun harus bisa dipahami oleh semua pihak karena dilakukan secara transparan dan bersifat terbuka.

“Harus melibatkan komite sekolah, guru dan orang tua siswa untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran yang dimana dilakukan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh narasumber lain.

“Pertama harus menyusun anggaran secara partisipasi. Memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak dan bersifat transparansi”

Narasumber lainnya juga berpendapat saat diwawancara.

“Dalam menentukan otonomi pembiayaan pendidikan harus dimulai dengan penyusunan anggaran secara partisipasi dari berbagai pihak yang melibatkan guru, komite dan siswa. Penyusunan dilakukan secara terbuka dan transparan untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab”

Penyusunan anggaran harus dilakukan dengan mendahului kebutuhan yang paling penting dan prioritas seperti perbaikan sarana dan prasarana, mengembangkan kurikulum dan meningkatkan kinerja guru.



Gambar 1. Penyusunan Anggaran Sekolah

b. Penggalangan Dana

Penggalangan dana yang dilakukan harus melibatkan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan seperti donasi, bazar dan kerjasama. Kerjasama yang dilakukan bisa dengan perusahaan atau pihak-pihak tertentu. Pengoptimalan penggunaan dana BOS juga harus dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran dan mengembangkan sekolah. Pendapatan lain juga bisa dilakukan dengan membuat usaha sekolah dan pengelolaan aset sekolah.

“Penggalangan yang didapatkan itu dari bantuan komite, masyarakat, dan orang tua murid. Kemudian dana bantuan juga didapatkan dari BOS dan pendapatan lainnya. Dana tersebut digunakan untuk meningkatkan pembelajaran dan mengembangkan sekolah”

Hal yang selaras juga disampaikan oleh narasumber lainnya.

“Penggalangan dana dilakukan dengan menyelenggarakan donasi, bazar, dan kerjasama dengan berbagai pihak seperti perusahaan. Dalam melakukan kegiatan tersebut juga masyarakat harus berpartisipasi dalam penyelenggaraannya”.

Dalam penggalangan dana yang dilakukan harus melibatkan semua warga sekolah agar terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Dan memanfaatkan dana BOS dan mencari pendapatan lain seperti usaha yang halal.

c. **Pengelolaan Keuangan**

SMP Negeri 6 Tanjungpandan menerapkan sistem akuntansi dalam pengelolaan keuangan yang sederhana dan mudah dipahami. Proses pengelolaan keuangan yang dilakukan adalah membuat laporan secara berkala untuk disampaikan kepada seluruh komponen sekolah dan masyarakat kemudian diperiksa untuk memastikan kalau penggunaan anggaran sesuai dengan yang dikeluarkan.

“Pengelolaan keuangan dilakukan secara berkala dengan membuat laporan keuangan pemeriksaan keuangan dengan bentuk sistem akuntansi yang baik”.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh SMP Negeri 6 Tanjungpandan dikelola secara optimal yang ditunjukkan dengan melakukan pemeriksaan dan membuat laporan keuangan secara berkala merupakan contoh baik dalam mewujudkan tata kelola sekolah yang baik.



Gambar 2. Rapat Komite

2. **Pengelolaan Pembelajaran**

Otonomi memberikan ruang yang lebih luas dalam melakukan pengelolaan pembelajaran. Meskipun ketetapan dari Kemendikbud, tetapi otonomi dilaksanakan fleksibel untuk mengembangkan kurikulum dan menilai siswa.

a. **Mengembangkan Kurikulum**

Kurikulum yang dikembangkan di SMP Negeri 6 Tanjungpandan disesuaikan dengan karakteristik siswa, kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Inovasi pembelajaran yang dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan dan metode pembelajaran yang relevan.

“SMP Negeri 6 Tanjungpandan mengembangkan kurikulum dengan kondisi lingkungan , karakteristik siswa, dan kebutuhan masyarakat. Inovasi pembelajaran berupa pendekatan dan metode yang relevan”.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh narasumber lain.

“Kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Sekolah juga melakukan inovasi dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan dan metode”.

Pengembangan kurikulum yang dilakukan merupakan langkah positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara melakukan perbaikan dan inovasi pembelajaran yang bisa menghasilkan lulusan berkualitas.

b. Instrumen Penilaian

SMP Negeri 6 Tanjungpandan menggunakan instrumen penilaian dengan melibatkan berbagai pihak, agar mendapatkan data yang akurat dan relevan dalam memperbaiki kualitas pembelajaran.

“Mengukur keberhasilan sasaran pembelajaran membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan inovatif yang menggunakan berbagai instrumen penilaian dengan melibatkan berbagai pihak”

Guru mata pelajaran di SMP Negeri 6 Tanjungpandan

“Yang dilakukan disini ialah dengan menggunakan pendekatan komprehensif dan inovatif. Dengan instrumen penilaian yang melibatkan berbagai pihak dapat memperoleh data yang akurat untuk memperbaiki kualitas pembelajaran”

Komite di SMP Negeri 6 Tanjungpandan

“Menggunakan instrumen penilaian memperoleh data yang akurat dalam memperbaiki kualitas pembelajaran dengan menggunakan pendekatan yang dapat mengukur keberhasilan sasaran pembelajaran”

SMP Negeri 6 Tanjungpandan menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dengan penggunaan instrumen penilaian yang komprehensif dan inovatif. Dengan mengembangkan sistem penilaian dengan melibatkan berbagai pihak, memiliki potensi untuk mencapai hasil pembelajaran yang baik.

3. Pengambilan Keputusan

Dalam menerapkan otonomi, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh SMP Negeri 6 Tanjungpandan adalah musyawarah guru, keterlibatan masyarakat, dan menentukan standar kinerja guru.

a. Musyawarah Guru

Pengambilan keputusan yang dilakukan di SMP Negeri 6 Tanjungpandan melalui musyawarah guru untuk berdiskusi dan mengambil keputusan bersama. Musyawarah yang dilakukan terkait dengan masalah-masalah pembelajaran.

“Dalam pengambilan keputusan harus diadakan musyawarah guru yang dimana dengan musyawarah ini dapat terlaksana diskusi untuk mengambil keputusan bersama”.

Komite sekolah SMP Negeri 6 Tanjungpandan berpendapat:

“Melalui musyawarah, guru dapat melakukan diskusi dan pendapat untuk mengatasi terkait masalah pembelajaran yang ada”.

Adanya kesepahaman yang kuat di SMP Negeri 6 Tanjungpandah dimana musyawarah guru sebagai mekanisme efektif dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran. Dengan diskusi bersama, guru dapat menemukan solusi untuk mengatasi masalah agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.



Gambar 3. Musyawarah Guru

b. Keterlibatan Masyarakat

Masyarakat selalu dilibatkan dalam hal yang berkaitan dengan pengembangan sekolah. SMP Negeri 6 Tanjungpandah menyelenggarakan forum komunikasi antara sekolah dan masyarakat. Kerjasama ini dilakukan untuk mendukung kegiatan sekolah.

“Masyarakat tidak lepas dalam pengambilan keputusan sekolah yang berkaitan dengan pengembangan sekolah, seperti program-program bagi masyarakat dan pembangunan sarana prasarana”

SMP Negeri 6 Tanjungpandah sangat menghargai peran serta masyarakat dalam pengembangan sekolah. keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada sekolah saja, tetapi juga dibutuhkan dukungan aktif dari masyarakat.



Gambar 4. Rapat Orang Tua Siswa

Pembahasan

1. Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan merupakan sebuah aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima, dan bagaimana pemanfaatan dana tersebut untuk membiayai segala keperluan dalam pelaksanaan program-program pendidikan (pengeluaran), sumber pembiayaan pendidikan yang di terima oleh setiap lembaga pendidikan adalah dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD), juga dari iuran masyarakat atau orang tua (Purba et al., 2024).

Otonomi sekolah dalam pembiayaan mampu memberikan kekuatan bagi sekolah untuk menarik dana-dana yang berasal dari luar karena sekolah yang dinilai mempunyai kemampuan swadana bagi pengembangan program-program unggulan sehingga pihak luar pun atau pemerintah memberikan kepercayaan kepada sekolah (Pamuji, 2023).

Dari hasil wawancara oleh narasumber yang di berikan bahwa SMP Negeri 6 Tanjungpandan dalam menyusun anggaran harus melibatkan beberapa pihak seperti orang tua siswa, guru dan komite. Dimana penyusunan anggaran bersifat transparansi yang artinya penyusunan tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan. Tujuannya untuk meningkatkan rasa tanggungjawab dan memiliki.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lestari, (2023) di SDIT Robbani Cendekia Ponorogo bahwa di dalam proses penyusunan RKS dan RKAS sudah berupaya untuk membangun akuntabilitas yang dibuktikan dengan dilakukan Rapat Kerja tahunan diikuti oleh seluruh pengurus yayasan dan lembaga pendidikan. Rapat koordinasi antara seluruh komite, guru dan kepala sekolah dalam penyusunan RKAS, dilaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menentukan besar anggaran dan dana dari masyarakat. Musyawarah dilakukan dalam rapat komisi dan hasilnya disampaikan bersama-sama dalam rapat pleno untuk mendapatkan persetujuan kemudian mengundang wali murid untuk sosialisasi dan informasi program.

Hal ini senada dengan pernyataan dari Sukatin et al., (2023) bahwa dalam menyusun anggaran untuk pembiayaan pendidikan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan dilakukan secara transparan dimana dengan menggabungkan manajemen efektif, perencanaan strategis dan melibatkan pemangku kepentingan. Dengan dilakukannya pendekatan tersebut dapat diidentifikasi sumber pendanaan, perhitungan biaya operasional dan penyusunan anggaran yang selaras dengan prioritas. Lestari, (2023) juga menyampaikan bahwa penyusunan anggaran menggunakan pendekatan sistematis untuk memastikan alokasi sumber daya secara efektif. Dengan melakukan perencanaan pendapatan, manajemen pengeluaran dan prioritas program dapat menilai efektivitas dan efisiensi pendidikan.

Menurut hasil wawancara SMP Negeri 6 Tanjungpandan melibatkan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan penggalangan dana seperti bazar dan donasi, serta dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu. SMP Negeri 6 Tanjungpandan juga mengoptimalkan dana BOS untuk meningkatkan pembelajaran dan mengembangkan sekolah. Sekolah juga melakukan berbagai usaha dan pengelolaan aset sekolah untuk pendapatan lain.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Juswar Ardiansyah et al., (2024) di SMP Negeri 4 Rejang Lebong menyatakan bahwa dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 4 Rejang Lebong dilakukan penggalangan dana mandiri, yang dimana dana didapatkan melalui kegiatan seperti bazar, konser amal atau program donasi baik dari alumni atau masyarakat sekitar. Sekolah yang kreatif dalam melaksanakan kegiatan penggalangan dana mandiri sering berhasil dalam mendapatkan dana tambahan yang signifikan.

Penggunaan dana BOS untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada peserta didik melalui penyediaan alat multimedia, pembelajaran dengan pengadaan modul, penyusunan modul dan media pembelajaran yang berbasis teknologi, penyediaan alat dan bahan keterampilan, komputer atau laptop dan alat multimedia lainnya (Pontoh et al., 2017).

Hal ini selaras dengan pernyataan (Nuriah & Deca, 2023) bahwa penggalangan dana meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk program dan kegiatan pendidikan. Menurut Solehan, (2022)

bahwa penggalangan dana yang efektif penting untuk mengoptimalkan sumber dana serta pengalokasiannya dapat digunakan sebagai fasilitas pendukung pembelajaran, dan meningkatkan mutu pendidikan.

Pengelolaan keuangan di SMP Negeri 6 Tanjungpandan dilakukan secara sederhana dan mudah dipahami. Proses yang dilakukan berupa membuat laporan secara berkala untuk bisa di sampaikan kepada seluruh komponen sekolah dan masyarakat. Setelah laporan dibuat, kemudian diperiksa untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan yang dikeluarkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatra & Harapan, (2017) di SMA Muhammadiyah 1 Palembang bahwa pertanggungjawaban keuangan sekolah di buat oleh bendahara dan kepala sekolah yang diketahui oleh komite setiap bulannya, laporan yang dibuat disertai dengan kelengkapan dari berbagai data pendukung seperti pengeluaran dan perincian pengeluaran keuangan. Selain itu pertanggungjawaban keuangan sekolah dibuat secara berkala dalam bentuk laporan triwulan dan tahunan. Setiap bulan laporan disampaikan kepada masyarakat dengan cara ditempel pada papan pengumuman.

Hal ini senada dengan Azizah, (2021) bahwa pengelolaan keuangan merupakan aspek penting dimana harus dilakukan perencanaan, penggunaan, pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana. Menurut Andiawati, (2017) proses pengelolaan keuangan dilakukan secara teliti, akurat, transparan akuntabel, efektif dan efisien. Sumber dana berasal dari orang tua, masyarakat dan pemerintah.

2. Pengelolaan Pembelajaran

Pengelolaan pembelajaran terdiri dari dua kata yaitu kata pengelolaan dan pembelajaran. Pengelolaan dapat diartikan “manajemen”. Sedangkan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 menyatakan bahwa “pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar” (Erwinsyah, 2017).

Pengelolaan pembelajaran merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran adalah cara guru menjalankan dan mengontrol aktivitas kelas, misalnya mengatur ruang kelas, kebersihan kelas, perabot kelas, strategi tempat duduk, kehadiran siswa dan hal lainnya yang ada hubungan dengan pekerjaan guru sebagai manajer kelas (Erwinsyah, 2017).

Kurikulum yang dikembangkan oleh SMP Negeri 6 Tanjungpandan disesuaikan dengan karakteristik siswa, kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Sekolah juga melakukan inovasi dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan dan metode pembelajaran. Pengembangan kurikulum tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Rini et al., (2023) menyatakan bahwa kurikulum juga perlu diadaptasi karena menyesuaikan dengan lingkungan dan ekosistem sekolah meliputi kondisi fisik, sosial, buda dan lingkungan sekitar. Sehingga kurikulum dapat dipergunakan dengan menekankan pada pengembangan nilai-nilai lokal atau mengintegrasikan budaya daerah dalam pembelajaran. Selain itu, kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa seperti kebutuhan khusus atau kondisi fisik tertentu. Kebutuhan siswa berasal dari latar belakang yang berbeda seperti budaya dan bahasa yang berbeda.

Pengembangan kurikulum di sekolah merupakan proses penting untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi masa depan (Rosnaeni et al., 2022). Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan kondisi dan potensi serta peserta didik (Rahmawati et al., 2024). Kurikulum yang dikembangkan dengan baik, dapat memberikan nilai-nilai karakter terhadap siswa (Halimah, n.d.).

Instrumen penilaian yang dilakukan SMP Negeri 6 Tanjungpandan bertujuan untuk mengukur keberhasilan sasaran pembelajaran dengan pendekatan komprehensif dan inovatif. Dengan melibatkan berbagai pihak dapat memperoleh data yang akurat dan relevan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Sukma, (2024) di SMP Negeri 19 Palu bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilan, tim menggunakan berbagai indikator pemahaman dan keterampilan guru dalam menyusun

instrumen penilaian. Indikator yang digunakan membantu untuk menilai dampak yang telah dicapai dan dapat memastikan bahwa tujuan tercapai secara efektif.

Instrumen penilaian merupakan alat penting yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah pengembangan instrumen yang efektif mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik (Sugiarti et al., 2022). Evaluasi pembelajaran melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengolahan dan analisis penilaian, yang berfungsi untuk membantu guru dalam menemukan kelebihan dan kekurangan proses pembelajaran (Mahrunnisya, 2022).

3. Pengambilan Keputusan

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menjadi suatu model manajemen sekolah memotivasi pengambilan keputusan dengan melibatkan partisipasi langsung dari seluruh warga sekolah, seperti guru, siswa, kepala sekolah, pegawai sekolah, orang tua siswa dan masyarakat sekitar dalam upaya meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan Nasional. Pengambilan keputusan bersama di kalangan stakeholder pada level sekolah merupakan kunci utama dalam melaksanakan MBS (NOVIANA, 2024).

SMP Negeri 6 Tanjungpandan melakukan musyawarah guru untuk berdiskusi dan mengambil keputusan bersama terkait dengan permasalahan-permasalahan pembelajaran yang ada. Musyawarah dilakukan untuk mencari solusi untuk mengatasi permasalahan agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.

Menurut penelitian Riyannie et al., (2024) menyatakan bahwa guru dilibatkan dalam pengambilan keputusan seperti kesempatan untuk memilih jadwal dan beban pengajaran. Melibatkan guru dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk menyelesaikan suatu permasalahan di sekolah dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Hal ini selaras dengan Tampubolon, (2023) yang menyatakan bahwa melibatkan guru dalam proses pengambilan keputusan dapat berdampak positif pada kinerja guru dan hasil sekolah. pengambilan keputusan yang efektif mengharuskan kepala sekolah untuk menggunakan pendekatan yang menumbuhkan komunikasi terhadap guru. Pengambilan keputusan yang kolaboratif cenderung menghasilkan hasil yang lebih baik daripada keputusan individu.

SMP Negeri 6 Tanjungpandan melibatkan masyarakat dalam hal yang berkaitan dengan pengembangan sekolah. Dengan menyelenggarakan forum komunikasi antara sekolah dan masyarakat kerjasama dilakukan untuk mendukung kegiatan sekolah.

Menurut penelitian yang dilakukan Rif'ah et al., (2023) di SMP Muhammadiyah Makassar bahwa sekolah dalam melaksanakan program turut melibatkan masyarakat yang dimana dalam menyediakan dan memfasilitasi kegiatan dan program sekolah. Mulai dari lokasi kegiatan, tempat istirahat, dan transportasi peserta didik. Hal ini memberikan kemudahan bagi sekolah dalam pelaksanaannya. Masyarakat juga terlibat secara langsung dalam program sekolah yang secara tidak langsung turut mengawasi evaluasi kinerja sekolah. Proses kerjasama sekolah dan masyarakat pasti ada berbagai kendala dan hambatan. Untuk mengatasi hambatan tersebut dibutuhkan teknik kerjasama yang baik seperti teknik tertulis dan teknik lisan. Teknik tertulis bisa menggunakan media cetak dan *digital* seperti *banner*, kalender dan brosur sekolah. Sedangkan teknik lisan dilakukan dengan kegiatan rapat, pertemuan orang tua dan sosialisasi serta kegiatan sekolah dalam bentuk forum diskusi dengan masyarakat.

Hal ini senada dengan Aisyah, (2021) bahwa keterlibatan masyarakat merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Partisipasi masyarakat bisa berupa kehadiran dalam rapat, pemberian ide dan dukungan dalam pelaksanaan program sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat secara fleksibilitas dan desentralisasi. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di sekolah didukung oleh UU No.20 tahun 2003 (Rodliyah, 2012).

SIMPULAN

Otonomi sekolah adalah upaya memberikan kebebasan yang lebih besar kepada sekolah dalam mengelola segala aspek pendidikan, mulai dari kurikulum, metode pengajaran, dan pengelolaan sumber daya. Tujuan utama dari otonomi adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Otonomi sekolah juga di bagi menjadi 3 aspek yaitu pembiayaan pendidikan, pengelolaan pembelajaran dan pengambilan keputusan.

Otonomi adalah langkah tepat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Namun, keberhasilan dari otonomi harus melibatkan komitmen dari semua pihak seperti, pemerintah, guru, siswa, orang tua hingga masyarakat. Dengan adanya dukungan dan upaya bersama, otonomi sekolah dapat menjadi solusi dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2021). Peran Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di MTS AL-Faazun Watang Palakka. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 34–43.
- Andiawati, E. (2017). Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan/Sekolah. *Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 170–185.
- Anggraeni, A. D. (2016). Pelaksanaan Otonomi Sekolah di dalam Upaya Penyelenggaraan Pendidikan yang Efektif. *Faktor: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 3(2), 173–184.
- Azizah, N. (2021). *Pengelolaan Sistem Administrasi Keuangan di Sekolah*.
- Churdaini, M. (2020). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 17 Purworejo. *Cakrawala: Jurnal Kajian Studi Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 4(1), 21–33.
- Darojat, A. Z., Kulsum, U., & Iqbal, R. (2022). Implementasi Manajemen Mutu Berbasis Madrasah pada Madrasah Ibtidaiyah Al Khoiriyah Kota Bandar Lampung. *Unisan Jurnal*, 1(1), 432–440.
- Devi, A. D., & Subiyantoro, S. (2021). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas di Sekolah Menengah Pertama. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 963–971. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/481>
- Efriani, E., Ahyani, N., & Fattah, A. H. (2021). Implementasi Manajemen Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). *Pamator Journal*, 14(2), 117–121. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.11533>
- Erwinsyah, A. (2017). Manajemen Pembelajaran dalam Kaitannya dengan Peningkatan Kualitas Guru. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 69–84.
- Fatra, F., & Harapan, E. (2017). Implementasi Prinsip dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Palembang. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, 2(1), 46–54.
- Halimah, N. (n.d.). Telaah Komponen Dan Pendekatan Pengembangan Kurikulum. *Dosen Tetap Yayasan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang*.
- Hamidi, M. (2016). *Implementasi Otonomi Sekolah di Era Otonomi Daerah*. 3.
- Hardi Jansa, Happy Fitria, & Achmad Wahidy. (2021). Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah. *Jambura Journal of Educational Management*, 01(0), 32–52. <https://doi.org/10.37411/jjem.v2i1.622>
- Ismanto, H., Murtafiah, N. H., & Lestari, S. (2022). Implementasi Peran Komite Sekolah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1 Bakauheni Lampung Selatan. *Unisan Jurnal*, 1(1), 491–501.
- Juswar Ardiansyah, A., Fathurrohman, I., & Bahri, S. (2024). *Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan*

- 6706 *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah untuk Meningkatkan Otonomi Sekolah di SMP - Orrochelcyra Mardly Narendas, Suyatno Suyatno, Hendro Widodo*
DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i6.7756>
- Mutu Pendidikan di SMP Negeri 4 Rejang Lebong*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Lestari, A. (2023). Penyusunan Rencana Kegiatan Sekolah dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah di SDIT Robbani Cendekia Ponorogo. *YASIN*, 3(5), 1003–1012.
- Mahrurnisya, D. (2022). Analisis Instrumen dalam Evaluasi Pembelajaran di Sekolah. *Journal of Social Science Education*, 3(2), 92–98.
- Makmur Jaya, Evanirosa, & Marlina. (2021). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini. *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 1(2), 41–47.
<https://doi.org/10.57251/ped.v1i2.137>
- Maulana, I., Metriani, L. P., Syahira, F., Yantoro, Y., & Setiyadi, B. (2023). Analisis Penerapan Otonomi dan Desentralisasi Pendidikan di SDN 195/VI Pematang Kancil. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 6528–6533.
- Meilani, H., Lubis, M. J., & Darwin, D. (2022). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di dalam Kepemimpinan Kepala Sekolah. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 4374–4381.
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2840>
- Muhammad, S., & Rahman, M. (2017). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Sekolah Dasar Islam Insan Kamil Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. *Edukasi*, 15(1).
- Noviana, H. (2024). Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Akidah Akhlak. *Unisan Jurnal*, 3(4), 579–592.
- Nuriah, F. S., & Deca, D. (2023). Pengelolaan dan Pengalokasian Dana di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Global Futuristik*, 1(2), 168–175.
- Pamuji, S. (2023). Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan di MA Queen Al Khotijah Cilacap. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Darussalam (JMPID)*, 5(2), 204–210.
- Pontoh, J., Ilat, V., & Manossoh, H. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 8(2).
- Pratiwi, S. N. (2016). Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah. *EduTech*, 2(1), 86–96.
- Priyadi, Y. (2024). *Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Otonomi Sekolah yang Berkelanjutan di Lingkungan Pendidikan Islam*. 512–523.
- Purba, A. W. A., Situmeang, N. T. F. N., Fitriani, D., Febry, K., Sihombing, F., & Siregar, Y. R. (2024). Problematika Pembiayaan Pendidikan di Sekolah. *Nizhamiyah*, 14(1), 64–80.
- Rahmawati, S., Astuti, D., & Fadriati, F. (2024). Peran Guru dalam Pengembangan Kurikulum Merdeka. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(3), 3026–3038.
- Rif'ah, M., Ramadhan, M. R. N., Wahyudin, M. R., Fahmi, M. F., Binfas, M. A. M., & Audia, C. (2023). Administrasi Hubungan Kerjasama Sekolah dan Masyarakat. *Journal on Education*, 6(1), 7639–7647.
- Rini, A. P., Firmansyah, N. F., Widiastuti, N., Christyowati, Y. I., & Fatirul, A. N. (2023). Pendekatan Terintegrasi dalam Pengembangan Kurikulum Abad 21. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 2(2), 171–182.
- Riyannie, D., Suriansyah, A., & Wahyu, W. (2024). Kepemimpinan Kepala Sekolah pada SMA Unggul (Studi Multi Kasus pada SMA Negeri 1 Kuala Kapuas dan SMA Negeri 1 Basarang Kabupaten Kapuas). *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(7), 392–406.
- Rodliyah, S. (2012). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Sekolah*.
- Rosnaeni, R., Sukiman, S., Muzayanati, A., & Pratiwi, Y. (2022). Model-Model Pengembangan Kurikulum di Sekolah. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 467–473.

- 6707 *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah untuk Meningkatkan Otonomi Sekolah di SMP - Orrochelcya Mardly Narendas, Suyatno Suyatno, Hendro Widodo*
DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i6.7756>
- Solehan, S. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Edumaspol. Jurnal Pendidikan*, 6(1), 98–105.
- Sugiarti, S., Lubis, P. H. M., Hakim, L., Sulistyowati, R., Sulistiawati, S., Lia, L., & Lefudin, L. (2022). Pelatihan Penyusunan Instrumen Penilaian pada Guru di SMA Negeri 2 Indralaya Utara. *Wahana Dedikasi: Jurnal PkM Ilmu Kependidikan*, 5(2), 203–209.
- Sukatin, S., Rukmanah, S., Rosanti, R., & Karim, H. (2023). Manajemen Keuangan atau Pembiayaan Pendidikan. *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 3(2), 277–282.
- Sukma, S. (2024). Pelatihan Penyusunan Instrumen Penilaian dalam Pembelajaran Bahasa di SMP Negeri 19 Palu: Optimization of Language Learning Through Training in Assessment Instrument Development. *Journal of Community Empowerment Research and Global Action Studies*, 1(1), 1–8.
- Tampubolon, P. D. S. R. (2023). Manajemen Sekolah Terkait Analisis Pendekatan Hubungan Manusia terhadap Partisipasi Guru Pendidikan dalam Pengambilan Keputusan. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 11(2), 447–475.
- Wahyuningrum, M. M. (2011). Profesionalisasi Kepala Sekolah dalam Menciptakan Iklim Kondusif di Sekolahannya. *Jurnal Manajemen Pendidikan UNY*, 112561.